

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
ANGGARAN BELANJA BARANG
PADA SATUAN KERJA KEPOLISIAN DAERAH
SULAWESI UTARA**

Oleh:

Rovilia Sikon

NIM : 20043083



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO-JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Batasan Masalah	4
1.3 Rumusan Penelitian	4
1.4 Tujuan Masalah	4
1.5 Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Akuntansi Pemerintahan Pusat	6
2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	7
2.3 Anggaran	9
2.4 Laporan Realisasi Anggaran	10
2.5 Belanja	14
2.6 Efektivitas	17
2.7 Penelitian Terdahulu	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian	22
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	22
3.3 Sumber Data	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data	23
3.5 Teknik Analisis Data	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
4.1 Gambaran Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara	24

4.2	Pembahasan Hasil Penelitian.....	30
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		44
5.2	Kesimpulan.....	44
5.2	Rekomendasi	44
DAFTAR PUSTAKA.....		46
LAMPIRAN.....		49



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur bangsa dan negara (Apriyanti et al., 2020). Dengan kekuasaannya, pemerintah memimpin arah dan kebijakan untuk mencapai kesejahteraan bersama serta menjaga stabilitas dan keamanan dalam masyarakat. Setiap lembaga di dalam negara bekerja dengan memanfaatkan seluruh potensinya untuk mendukung usaha pembangunan negara dan bangsa yang lebih baik. Pemerintah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan negara harus didasarkan pada reformasi pengelolaan keuangan negara. Pengesahan Undang-undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjadi landasan hukum yang kokoh bagi reformasi tersebut.

Reformasi tersebut dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan sumber daya keuangan yang memadai dari negara kepada setiap institusi untuk menjalankan kegiatan organisasinya. Oleh karena itu, pencapaian tujuan negara selalu berkaitan dengan keuangan negara sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan. Menurut Pratama (2023), keuangan negara adalah seperangkat peraturan yang secara berkala ditetapkan, memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan pengeluaran dalam periode waktu tertentu, dan menunjukkan sumber pendanaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.

Kuangan negara adalah salah satu instrumen utama yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan negara. Undang-undang No 17 tahun (2003) tentang keuangan negara menjelaskan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam hal ini, pencapaian tujuan negara selalu terhubung dengan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun (2004) tentang Perbendaharaan Negara, kebijakan pengelolaan keuangan

negara diterapkan berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan yang baik yaitu asas kesatuan menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara/daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran, asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran, asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun tertentu, dan asas spesialisasi mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.

Salah satu lembaga negara yang didukung oleh negara dengan kemampuan keuangan yang memadai karena perannya yang sangat besar adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Polri bertindak atas nama pemerintah untuk memberikan rasa aman, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat serta seluruh warga negara.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur bangsa dan negara, serta penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama. Pencapaian tujuan negara selalu terkait erat dengan perencanaan keuangan negara sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan keuangan ini seringkali disebut juga dengan anggaran.

Dalam suatu instansi, anggaran memegang peran penting karena anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan suatu organisasi. Jika tidak ada alokasi anggaran, maka kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Anggaran adalah hasil dari perencanaan manajemen yang penting. Melalui analisis anggaran, manajemen dapat memperkirakan jumlah pengeluaran yang dibutuhkan untuk memastikan konsistensi dengan anggaran yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi penyimpangan (Wijaya et al., 2023). Dengan memanfaatkan anggaran dengan baik, pemerintah dapat mengoptimalkan alokasi dana untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks anggaran saling terikat dengan belanja.

Salah satu jenis belanja pemerintah adalah belanja barang. Anggaran belanja barang adalah akuisisi barang dan jasa yang digunakan secara habis untuk produksi barang dan jasa yang akan dijual atau tidak (Daryanti & Sinnang, 2019). Belanja barang merupakan salah satu kategori penting dari pengeluaran pemerintah. Sehingga

diharapkan bahwa alokasi belanja barang dapat dikelola secara optimal dalam hal efektivitas.

Efektivitas diinterpretasikan sebagai indikator kesuksesan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas menggambarkan keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, efektivitas mencerminkan sejauh mana sebuah organisasi mencapai tujuannya.

Menurut Ajrullah dalam (Wenas et al., 2020), dalam era penerapan *Good Governance* saat ini, upaya mengelola dan menjalankan roda pemerintahan harus berpegang teguh pada salah satu prinsip yaitu efektivitas. Dalam hal ini adalah efektivitas pengelolaan untuk anggaran.

Efektivitas sangat penting untuk mengukur pencapaian pengelolaan anggaran karena efektivitas memberikan gambaran mengenai sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan sumber daya yang digunakan. Ini membantu dalam menilai kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran, memastikan bahwa dana publik digunakan secara optimal untuk memberikan hasil yang diinginkan.

Kepolisian Daerah Sulawesi Utara sebagai salah satu institusi penegak hukum memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara membutuhkan anggaran yang memadai untuk membiayai berbagai kegiatan operasionalnya, khususnya pada satuan kerja bidang keuangan kepolisian daerah Sulawesi Utara. Salah satu komponen penting dalam anggaran tersebut adalah anggaran belanja barang.

Anggaran belanja barang digunakan untuk membiayai pembelian berbagai kebutuhan barang yang diperlukan oleh satuan kerja bidang keuangan. Pengelolaan anggaran belanja barang yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan di Satuan Kerja Bidang Keuangan Polda Sulawesi Utara meliputi serangkaian tahapan, dimulai dari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) hingga penetapan dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dalam pelaksanaan anggaran pada satuan kerja bidang keuangan adanya realisasi anggaran belanja barang yang belum optimal.

Hal ini dapat dilihat dari realisasi yang tidak memenuhi target anggaran belanja barang di akhir tahun anggaran.

Perencanaan keuangan, terutama melalui anggaran, memegang peranan penting sebagai rencana keuangan yang mendukung pelaksanaan program kegiatan organisasi. Penggunaan anggaran yang efektif sangat penting untuk mengoptimalkan alokasi dana dan mencapai tujuan organisasi. Efektivitas anggaran tercermin dalam seberapa baik organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan belanja barang menjadi salah satu komponen penting dalam pengeluaran pemerintah yang membutuhkan manajemen yang efisien. Meskipun demikian, tantangan dalam pengelolaan anggaran masih ada, seperti yang terlihat dari Satuan Kerja Bidang Keuangan Polda Sulawesi Utara yang menunjukkan realisasi yang tidak memenuhi target anggaran belanja barang di akhir tahun anggaran, mengindikasikan bahwa realisasi anggaran belum optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja Barang Pada Satuan Kerja Kepolisian Daerah Sulawesi Utara**”

1.2 Batasan Masalah

Untuk mencegah perluasan permasalahan penelitian, peneliti membatasi pada anggaran belanja barang satuan kerja bidang keuangan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara yang tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran.

1.3 Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah. Bagaimana efektivitas pengelolaan anggaran belanja barang pada Satuan Kerja Bidang Keuangan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara?

1.4 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pengelolaan anggaran belanja barang pada Satuan Kerja Bidang Keuangan Kepolisian Daerah Sulawesi utara.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan acuan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran belanja barang, selain itu dapat mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang dihadapi, baik dalam operasi sehari-hari maupun dalam pengembangan jangka panjang.

2. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat di bidang pendidikan sebagai bahan masukan dalam proses pembelajaran mahasiswa ekonomi terlebih khusus di bidang akuntansi, tentang efektivitas pengelolaan anggaran belanja barang.

3. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan tentang analisis efektivitas pengelolaan anggaran belanja barang.

